

POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA KENDARI

Muhammad Syafrudin Hali
Mahasiswa Pascasarjana
Universitas Halu Oleo, Kendari
Email : syafrudinmuhammad86@gmail.com

Baheri
Universitas Halu Oleo, Kendari

Fajar Saranani
Universitas Halu Oleo, Kendari

-Abstract

This study aimed at determining and analyzing the growth and contribution of each type of local tax and retribution on the total of local retribution and revenue. It also aimed to analyze the types of local taxes and what local retribution is having potential qualification for development in order to increase local revenue.

Result of the study showed that the biggest growth of local revenue is legal miscellaneous local revenue and local tax. The biggest contribution of local revenue is local tax and local retribution. In addition, the biggest contribution of tax on local revenue is restaurant tax and street lights tax, out of eleven types of taxes. The biggest contribution of retribution on local revenue is the retribution of healthcare service by Abunawas hospital and the retribution of building construction permits, out of eight types of retribution. Taxes with potentials qualification are, among others, hotel tax for melati second and restaurant, whereas local retribution with potential for qualification are the retribution of healthcare service by Abunawas hospital and retribution of building construction permits.

Keywords : Potential Revenue, Tax, And Retribution

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah menitikberatkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan/transfer pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan daerah sendiri yang dikenal dengan sebutan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dimanakomponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/ kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, disamping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan daerah. (Mohammad Riduansyah, Vol 7 , No. 2 Desember 2003)

Keberhasilan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan daerah di bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah. Menurut Kaho (1997:124), untuk menjalankan fungsi pemerintah faktor keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang membutuhkan biaya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan.

Sedangkan pembiayaan berasal dari:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
- b. Penerimaan pinjaman daerah;
- c. Dana cadangan daerah; dan
- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

PAD diharapkan dapat menjadi penyanggadal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Dengan semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya (Syamsi, 1987: 213).

Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap daerah tersebut. Menurut Insukindro, dkk. (1994:1) dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah. PAD dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Komponen PAD yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemerintah daerah hendaknya mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut karena pajak dan retribusi tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan daerah tidak optimal.

Demikian pula halnya dengan pemerintah Kota Kendari yang telah berupaya terus menerus meningkatkan PAD dengan berbagai cara seperti memperluas cakupan pungutan

pajak dan retribusi daerah, efisiensi biaya pemungutan dan penyempurnaan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Perkembangan realisasi PAD sebesar Rp. 28.159.235.500. Kemudian tahun 2008 mengalami kenaikan menjadi Rp. 32.581.583.141 atau naik Rp. 4.422.329.641 atau 15,7% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, tahun 2009 PAD yang masuk sebanyak Rp. 238.130.253.882 naik Rp. 5.548.670.741 atau 17,03 % . Tahun 2010 PAD yang masuk sebesar Rp. 49.469.468.367 atau mengalami kenaikan Rp. 11.339.214.485 atau 29,7% dan tahun 2011 juga mengalami kenaikan menjadi Rp. 66.518.757.063 atau mengalami kenaikan Rp. 17.049.228.696 atau 34,46% dari tahun sebelumnya.

Selama beberapa tahun realisasi penerimaan PAD cenderung meningkat. Peningkatan PAD Kota Kendari ini merupakan akibat perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di Kota Kendari secara pesat. Namun untuk mengetahui sejauh mana peningkatan itu terjadi perlu dibuat pengkajian mengenai penerimaan PAD dari jenis –jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di Kota Kendari. PAD dari jenis pajak daerah dan retribusi daerah perlu diukur dengan baik dan akurat agar potensi yang sebenarnya dapat dikelola dan dikumpulkan dengan secara maksimal. Penentuan potensi selama ini di Kota Kendari menurut informasi dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari dengan perkiraan yang berpedoman terhadap target pencapaian tahun anggaran sebelumnya. Hal ini seperti pendapat Dian Nastiti, dkk (2009) bahwa ada kecenderungan dari pemerintah daerah untuk menetapkan target pendapatan yang bersumber dari PAD lebih rendah walau realisasi tahun sebelumnya dan terkadang, para kepala daerah lebih senang mencari dana dari pemerintah pusat melalui DAU atau DAK dibandingkan menggali potensi PAD. Padahal potensi pajak daerah dan retribusi daerah secara riil tidak pernah dihitung dengan objektif, alasannya terlalu sulit menghitungnya karena membutuhkan data pendukung yang banyak, sedangkan banyak data yang tidak ada pada dinas-dinas terkait. Perkiraan target PAD sebenarnya tidak melihat potensi sebenarnya yang ada pada masyarakat.

Realisasi pajak daerah tahun 2007 di Kota Kendari mencapai Rp. 9.288.681, tahun 2008 Rp 10.383.083.387. Tahun 2009 Rp. 12.179.296.903, tahun 2010 Rp. 14.349.757.012 dan tahun 2011 sebesar Rp. 31.563.147.998.

Sedangkan retribusi daerah secara berurutan dari tahun 2007-2011 masing-masing Rp. 7.976.615.535, Rp 11.550.024.107, Rp. 15.550.686.096, Rp.17.130.301.246 serta Rp. 23.973.177.457. (www.inilah.com).

Dari sini diketahui realisasi pajak dan retribusi dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kota Kendari, penerimaan dan retribusi pasar mengalami peningkatan dan bahkan melampaui target yang diharapkan . Disisi lain terlihat bahwa pembangunan sarana dan sarana prasarana dari tahun ke tahun mulai mengalami perubahan/perbaikan.

Selain itu, ini menandakan bahwa salah satu indikator keberhasilan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Kendari. Namun perlu dikaji lebih jauh bahwa keberhasilan pencapaian dari target ini harus dilihat pula bagaimana cara penentuan target yang dilakukan setiap tahunnya.

Berdasarkan data, informasi dan keterangan di atas dapat dikatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Kendari belum dikelola dengan baik potensi yang sebenarnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mardiasmo, dkk (2000:1.3-4) menyatakan

bahwa di sisi penerimaan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya secara berkelanjutan masih lemah. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi penerimaan daerah yang akurat sehingga belum dapat dipungut secara optimal.

Sehubungan kurang diperhatikannya penerimaan pada daerah dan retribusi daerah yang potensial maka realisasi penerimaan PAD belum optimal sehingga penyelenggaraan otonomi daerah belum mendapat dukungan yang optimal juga dari sumber keuangan daerah.

Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa potensi pajak daerah dan retribusi daerah bagi pemerintah Kota Kendari belum diketahui, terutama jenis pajak daerah dan retribusi daerah apa saja yang menjadi pendapatan yang potensial bagi PAD. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial apabila diketahui dan ditingkatkan pengelolaan sesuai dengan potensinya akan memberikan tambahan PAD. Akan tetapi, apabila tidak diketahui potensinya akan membuat kerugian karena potensinya tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Sehubungan dengan fenomena di atas perlu dibuat rumusan masalah dengan baik. Oleh karena itu perumusan masalah dalam penelitian ini adalah jenis pajak daerah dan retribusi daerah apa saja yang memiliki kualifikasi potensial untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dan berapa nilai realisasi sebenarnya dari pajak daerah dan retribusi daerah yang memiliki kualifikasi potensial serta bagaimana proyeksi pajak daerah dan retribusi daerah dimasa yang akan datang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Menurut kamus ilmiah populer, identifikasi adalah pengenalan atau pembuktian sama. Jadi identifikasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah adalah : meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi jenis pajak daerah dan retribusi daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola jenis pajak daerah dan retribusi daerah tersebut sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Jenis pajak daerah kabupaten /kota menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Potensi Pendapatan Asli Daerah.

Mardiasmo dan Makhfatih (2000:8) menguraikan bahwa Potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel-variabel yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah.

Widayat (1994: 32) menguraikan beberapa cara untuk meningkatkan PAD melalui peningkatan penerimaan semua sumber PAD agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya. Selanjutnya dikatakan bahwa secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Lebih lanjut diuraikan bahwa salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan

penggalan sumber-sumber objek retribusi atau pajak ataupun dengan menjaring wajib pajak baru.

Pajak Daerah

Menurut Davey (1988:40) secara umum perpajakan daerah dapat diartikan sebagai berikut :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi penetapan tarifnya oleh pemerintah daerah;
3. Pajak yang ditetapkan atau dipungut oleh pemerintah daerah;
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagikan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah;

Didalam ketatanegaran Indonesia yang dimaksud dengan pajak daerah berdasarkan undang-undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1 nomor 10 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya, untuk menilai pajak daerah menurut devas, dkk (1989:61-62) menyebutkan bahwa kriteria suatu pajak daerah yang baik apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Hasil (yield) yaitu mamadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil pajak tersebut; perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya;
2. Keadilan (Equity) dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak harus adil secara horizontal (artinya beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama); adil secara vertikal (artinya beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar); dan pajak itu harus adil dari tempat ke tempat (dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat);
3. Daya guna ekonomi (Economic Efficiency). Pajak hendaknya mendorong (atau setidak-tidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak;
4. Kemampuan melaksanakan (ability to implement). Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha;

5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*stability as a local revenue source*). Ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Retribusi Daerah

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya diketahui bahwa beberapa atau sebagian besar pemerintah daerah belum mengoptimalkan penerimaan retribusi karena masih mendapatkan dana dari pemerintah pusat.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perlu dikaji pengelolaan untuk mengetahui berapa besar potensi yang riil atau wajar, tingkat keefektifan dan efisiensi. Peningkatan retribusi yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula pendapatan asli daerah.

Devas,dkk (1989:46) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sangat tergantung dari pemerintah pusat. Dalam garis besarnya penerima daerah (termasuk pajak yang diserahkan) hanya menutup seperlima dari pengeluaran pemerintah daerah. Meskipun banyak pula negara lain dengan keadaan yang sama atau lebih buruk lagi. Memang pemerintah daerah tidak harus berdiri sendiri dari segi keuangan agar dapat memiliki tingkat otonom yang berarti, yang penting adalah “ wewenang di tepi” artinya memiliki penerimaan daerah sendiri yang cukup sehingga dapat mengadakan perubahan disana-sini. Pada tingkat jasa layanan yang disediakan, untuk itu mungkin sudah memadai jika 20 % dari pengeluaran yang berasal dari sumber-sumber daerah. Hal tersebut diuraikan oleh Queeb (1998:12-18) bahwa pertumbuhan lain dalam meningkatkan retribusi yaitu peran masyarakat (publik) dalam politik. Masyarakat tidak senang terhadap perubahan hanya akan toleransi terhadap pembayaran retribusi, bukan semata sebagai sumber utama pendapatan daerah tetapi hanya dana pendamping.

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran memakai atau karena memperoleh jasa layanan langsung usaha milik daerah untuk kepentingan umum atau karena diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Sementara itu di dalam undang-undang nomor 34 tahun 2009 tentang perubahan undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1 nomor 64 bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Oleh karena itu, retribusi merupakan pembayaran atas penggunaan barang atau jasa yang disediakan untuk umum oleh pemerintah, maka penarikannya dilakukan umumnya di tempat pemakaian. Retribusi dapat juga ditagihkan kepada badan atau orang pribadi atas dasar pembayaran dengan penggunaan terbatas (dijatahkan) atau pembayaran dengan periode tertentu yang telah disepakati.

Hal tersebut di atas sejalan dengan uraian oleh Queen (1998:12-18) tentang permasalahan dan kebijaksanaan pelayanan oleh pemerintah daerah dikatakan pula bahwa persaingan retribusi antara pemerintah daerah tidak akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tarif, yang penting adalah bila ada pemerintah daerah yang berdekatan mengadakan atau menyediakan barang atau jasa yang sama maka saling tukar informasi menjadi penting untuk mengurangi kerugian.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi ciri-ciri retribusi daerah menurut kaho (1997:152) adalah sebagai berikut :

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah;
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkannya atau dengan jasa yang disiapkan daerah.

Menurut Devas (1997:352-353) ada dua konsep dasar desentralisasi yaitu desentralisasi politis dan desentralisasi manajemen, desentralisasi politis yaitu transfer wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Hal ini dilakukan karena memandang bahwa pemerintah daerah lebih dekat kepada warga negara, sehingga mampu membuat keputusan yang mencerminkan kebutuhan dan prioritas sedangkan yang dimaksud desentralisasi manajemen yaitu praktek pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pusat-pusat biaya kepada manajer unit.

Hal serupa dikemukakan oleh living stone dan charlton (1998:499) yaitu bahwa desentralisasi pemerintah dan desentralisasi keuangan pemerintah merupakan suatu tujuan yang penting di banyak negara sedang berkembang dan bahwa kabupaten atau kota lebih memungkinkan untuk lebih dekat dengan masyarakat, sehingga dapat mengetahui kebutuhan masyarakat dan pelayanan yang perlu disediakan untuk masyarakat. Akibatnya masyarakat juga memiliki kesadaran untuk membayar pajak sebagai kontribusinya, karena jumlah yang mereka kontribusikan kepada pemerintah langsung terlihat hasilnya. Saragih (1996:37-38) mengatakan bahwa pembangunan daerah yang dicanangkan. Keseluruhan program pembangunan daerah tersebut dijabarkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Disamping itu kunci sukses dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Konsentrasi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan daerah adalah sejalan dengan semangat otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi.

Keterbatasan dana pusat bagi pembangunan daerah dan dalam rangka penggalian potensi daerah memerlukan strategi pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber keuangan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) setiap daerah. Strategi pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber keuangan daerah bagi peningkatan pendapatan asli daerah adalah :

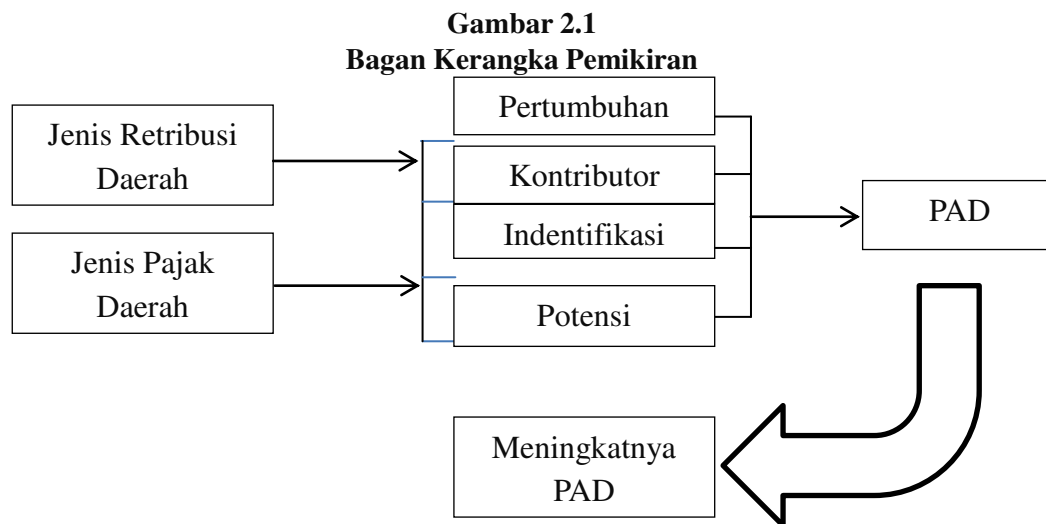
1. Strategi yang berkaitan dengan manajemen pajak/retribusi daerah;
2. Strategi ekstensifikasi sumber penerimaan daerah;
3. Strategi dalam rangka peningkatan efisiensi institusi.

Kerangka Pemikiran

Pendapatan asli daerah bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah lainnya. Rendahnya pendapatan asli daerah lainnya. Rendahnya pendapatan asli daerah suatu daerah disebabkan oleh rendahnya penerimaan komponen dari pendapatan asli daerah seperti retribusi daerah.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri. Pemerintah daerah melalui peraturan daerah dapat menetapkan jenis pajak daerah yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing namun harus tetap memperhatikan; (1) hasil (yield), (2) keadilan (equity), (3) daya guna ekonomi (ekonomi efficiency), (4) kemampuan melaksanakan (ability to implement), dan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (stability as a local revenue source). Komponen pas yang lain yang perlu diperhatikan dalam rangka peningkatan PAD adalah retribusi daerah, sehingga pemerintah daerah perlu mengkasji pengelolaannya untuk mengetahui berapa potensi yang riil atau wajar, tingkat keefektifan dan efisiensi. Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan jenis retribusi daerah dan seberapa besar kontribusi yang diberikan terhadap pendapatan asli daerah maka akan dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi jenis retribusi daerah dalam klasifikasi prima, potensial, berkembang dan terbelakang. Mengetahui identifikasi retribusi daerah, pemerintah Kota Kendari dapat mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap jenis retribusi asli daerah dari retribusi daerah.

Untuk mengetahui hubungna variabel pertumbuhan, kontribusi, identifikasi dan potensi retribusi daerah dapat digambarkan sebagai berikut :



Hipotesis

Pertumbuhan akan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang meningkat bukan berarti bahwa pendapatan asli Kota Kendari telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Potensi yang dimiliki oleh retribusi daerah Kota Kendari belum tergali sepenuhnya, sehubungan tersebut perlu kiranya dapat diklasifikasikan pajak dan retribusi daerah yang potensial sehingga penerimaannya dapat dimaksimalkan. Pada akhirnya retribusi daerah yang potensial apabila ditangani dengan baik akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan asli daerah Kota Kendari.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian-penelitian terdahulu serta kerangka pikir di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut

- a. Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah di Kota Kendari diduga mengalami fluktuasi/pola naik turun pada kurun waktu penelitian.
- b. Kontribusi setiap pajak dan retribusi daerah di Kota Kendari, diduga mengalami pola naik turun pada kurun waktu penelitian.
- c. Tidak semua pajak dan retribusi daerah di Kota Kendari teridentifikasi sebagai pajak prima dan potensial.
- d. Realisasi jenis pajak dan retribusi daerah diduga belum tentu sama dengan potensi penerimaan sebenarnya.

3.METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada bab terdahulu dan menguji hipotesis pada bab terdahulu. Penelitian mengumpulkan data-data jenis pajak dan distribusi daerah, kemudian mencari kontribusi dan pertumbuhan setiap jenis pajak dan distribusi daerah terhadap total penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah dan kemudian menentukan pajak dan retribusi daerah yang memiliki kualifikasi potensial untuk dikembangkan di Kota Kendari.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis data Objek penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari dan BPS Kota Kendari dan waktu kurang lebih selama dua bulan.

Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, antara lain:

1. Data sekunder, terdiri dari data pendapatan asli daerah, data jumlah jenis setiap retribusi daerah tahun anggaran 2007-2014. PDRB Kota Kendari dan Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2007-2014, data ini digunakan untuk analisis klasifikasi pertumbuhan sektor, analisis sektor basis dan non basis, dan

- analisis perubahan dan pergeseran sektor ekonomi. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kendari dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Data sekunder lainnya yang masih ada kaitannya dengan tujuan penelitian ini.

Definisi Operasional Variabel

1. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah realisasi penerimaan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
2. Pajak daerah adalah setiap jenis penerimaan pajak daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku selama satu tahun anggaran.
3. Retribusi daerah adalah setiap jenis penerimaan dari retribusi daerah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku selama satu tahun anggaran
4. Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah adalah pertumbuhan penerimaan yaitu kenaikan hasil (pertumbuhan penerimaan) setiap jenis pajak dan retribusi daerah terhadap kenaikan atau pertumbuhan penerimaan pajak dan retribusi daerah
5. Kontribusi adalah sumbangan yang diberikan oleh jenis pajak dan retribusi daerah terhadap total penerimaan retribusi daerah maupun terhadap total pendapatan asli daerah.
6. Identifikasi adalah meneliti, menentukan dan menetapkan jenis pajak dan retribusi daerah yang memiliki klasifikasi prima, potensial, berkembang dan terbelakang.
7. potensi retribusi daerah adalah kekuatan yang ada pada pajak dan retribusi daerah yang dapat dipungut untuk menghasilkan sejumlah penerimaan yang sesungguhnya terhadap pendapatann asli daerah.

Metode Dan Alat Analisis

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptid analisis dan kuantitatif analisis, sedangkan alat analisis yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Analisis tingkat pertumbuhan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan masing-masing jenis pajak atau retribusi daerah digunakan rumus

$$\Delta X_i = \frac{X_{it} - X_{it(t-1)}}{X_{it(t-1)}} \times 100\%$$

Dimana :

ΔX_{it} Adalah rasio pertumbuhan jenis pajak atau retribusi daerah

X_{it} Adalah jumlah jenis pajak atau retribusi daerah taun ke t

$X_{it(t-1)}$ Adalh jumlah jenis pajak atau retribusi daerah tahun ke t-1

2. Analisis tingkat kontribusi
Untuk mengetahui masing-masing jenis retribusi daerah digunakan rumus

$$\Delta X_i = \frac{X_i}{X} \times 100\%$$

Dimana :

ΔX_i Adalah rasio kontribusi jenis pajak daerah atau retribusi daerah

X_i Adalah jenis pajak daerah atau retribusi daerah

X Adalah total retribusi daerah

3. Analisis identifikasi jenis retribusi daerah dan pajak daerah adalah analisis overlay . Analisis ini dimaksud untuk melihat deskripsi kegiatan jenis retribusi daerah dan pajak daerah yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi. Terdapat 4 kemungkinan dalam analisis overlay :
 - a. Pertumbuhan (+) dan kontribusi(+), menunjukkan suatu kegiatan yang sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun dari kontribusi;
 - b. Pertumbuhan (+) dan kontribusi(-), menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya dominan tetapi kontribusinya kecil. Kegiatan ini dapat ditingkatkan kontribusinya untuk dipacu menjadi kegiatan yang dominan;
 - c. Pertumbuhan (-) dan kontribusi(+), menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya kecil tetapi kontribusi usinya besar, kegiatan ini sangat mungkin merupakan kegiatan yang sedang mengalami penurunan;
 - d. Pertumbuhan(-) dan kontribusi(-), menunjukkan suatu kegiatan yang tidak potensial dari kriteria pertumbuhan maupun kriteria kontribusi.

Untuk mengetahui jenis retribusi daerah diperlukan identifikasi atau klasifikasi kondisi yang didasarkan pada jumlah serta perkembangan setiap jenis pendapatan asli daerah (PAD). Identifikasi ini dilakukan dengan cara mematrik antara komposisi penerimaan dan pertumbuhan penerimaan, maksudnya :

- a. Komposisi penerimaan yaitu total hasil setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah terhadap rata-rata hasil penerimaan seluruhnya;
- b. Pertumbuhan penerimaan yaitu kenaikan hasil (perubahan penerimaan) setiap jenis penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kenaikan atau pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Tabel 4.1 matrik komposisi penerimaan dan pertumbuhan penerimaan Jenis retribusi daerah.

Kontribusi Pertumbuhan	$\frac{X_i}{X} \geq 1$ (tinggi)	$\frac{X_i}{X} \leq 1$ (rendah)
$\frac{DX_i}{DX} \geq 1$ (tinggi)	Prima	Berkembang
$\frac{DX_i}{DX} < 1$ (rendah)	Potensial	Terbelakang

Keterangan :

DX_i Adalah pertumbuhan setiap jenis retribusi daerah

DX Adalah pertumbuhan seluruh penerimaan retribusi daerah

X_i Adalah total hasil setiap jenis retribusi daerah

X Adalah rata-rata seluruh penerimaan retribusi daerah.

Berdasarkan analisis overlay dan klasifikasi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Kendari tahun anggaran 2007-2014 secara garis besar dikelompokkan menjadi 4 kondisi :

- Prima apabila retribusi daerah diberikan kontribusi dan pertumbuhan sama dengan atau lebih dari 1 persen;
- Potensial apabila retribusi daerah diberikan kontribusi sama dengan atau lebih dari 1 persen sedangkan pertumbuhan kurang dari 1 persen;
- Berkembang apabila retribusi daerah diberikan kontribusi kurang dari 1 persen sedangkan pertumbuhan sama dengan atau lebih dari 1 persen;
- Terbelakang apabila retribusi daerah diberikan kontribusi dan pertumbuhan kurang dari 1 persen;

Analisis Potensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Untuk menghitung dan menganalisis potensi retribusi daerah digunakan rumus yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Kendari melalui peraturan daerah. Perhitungan ini akan menggunakan data yang berkaitan terhadap perhitungan potensi sebenarnya.

4.HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Dan Kontribusi PAD

Pendapatan asli daerah Kota Kendari terdiri dari empat jenis yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan Tabel 5.5 pertumbuhan setiap jenis pendapatan asli daerah Kota Kendari mengalami fluktuasi. Rata-rata pertumbuhan dalam 8 tahun terakhir pengamatan, Jenis pendapatan asli daerah yang memiliki pertumbuhan terbesar yaitu Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 41,77% per tahun, kemudian

disusul Pajak daerah sebesar 37,92% per tahun, kemudian retribusi daerah sebesar 33,00% per tahun dan yang terkecil yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisah sebesar 24,05% per tahun. Pertumbuhan rata-rata seluruh komponen pendapatan asli daerah adalah sebesar 34,18% pertahun. Pertumbuhan rata-rata seluruh komponen pendapatan asli daerah terbesar terjadi pada tahun 2010 sebesar 86% dan yang terkecil pada tahun 2009 sebesar -5,40%.

Tabel 5.5 Pertumbuhan Jenis PAD Kota Kendari Tahun 2007-2014 (dalam %)

No	Pendapatan Asli Daerah	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata
1	Pajak Daerah	0	11,78	17,31	17,67	119,53	16,21	24,64	58,32	37,92
2	Retribusi Daerah	0	44,80	26,53	16,13	38,71	7,19	42,18	55,44	33,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisah	0	-4,93	-54,84	200,75	-8,17	57,74	-9,74	-12,48	24,05
4	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah	0	-24,16	-10,58	111,50	-54,72	23,60	66,36	180,39	41,77
Rata-Rata		0	6,87	-5,40	86,51	23,84	26,19	30,86	70,42	34,18

Sumber : diolah dari Lampiran 1 dan 2

Tabel 5.6 Kontribusi Jenis PAD Kota Kendari Tahun 2007-2014 (dalam %)

No	Pendapatan Asli Daerah	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata
1	Pajak Daerah	32,99	34,10	35,99	30,67	50,10	50,80	47,24	43,55	40,68
2	Retribusi Daerah	28,33	37,93	43,18	36,31	37,49	35,06	37,19	33,66	36,14
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisah	4,76	4,19	1,70	3,71	2,53	3,49	2,35	1,20	2,99
4	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah	33,92	23,79	19,14	29,31	9,88	10,65	13,22	21,59	20,19
Rata-Rata		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Sumber : diolah dari lampiran 1 dan 3

Berdasarkan Tabel 5.6 yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah dalam periode 8 tahun pengamatan diberikan oleh pajak daerah dengan rata-rata sebesar 40,68% per tahun, retribusi daerah sebesar 36,14% per tahun, Lain-lain pendapatan asli daerah yang asli sebesar 20,19% per tahun dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah sebesar 2,99% per tahun.

Pertumbuhan Dan Kontribusi Jenis Pajak Daerah

Pemerintah Kota Kendari sampai saat ini mengelola berbagai jenis pajak daerah seperti pajak Hotel Melati Dua, pajak Losmen / Rumah Penginapan / Pesanggraha/Hostel/Rumat Kos, pajak Restoran dan lain-lain. Berbagai jenis pajak daerah dapat dijadikan indikator tingkat pertumbuhan pendapatan daerah di Kota

Kendari yang dipengaruhi oleh setiap jenis pajak tersebut, hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.7.

Tabel 5. 7 Pertumbuhan Pajak Kota Kendari Tahun 2007-2014 (dalam %)

No	Jenis Pajak Daerah	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata
1	Hotel Melati Dua	0	7,099	3,937	49,207	79,236	23,644	22,913	75,200	37,320
2	Losmen / Rumah Penginapan / Pesanggraha/Hostel/Rumat Kos	0	92,536	675,708	18,191	62,321	14,982	26,060	53,858	134,808
3	Restoran	0	26,283	35,512	10,424	53,218	16,741	39,101	-6,905	24,911
4	Rumah Makan	0	17,735	9,666	24,013	67,864	38,299	14,063	9,820	25,923
5	Warung	0	24,204	2,992	2,568	24,817	35,784	54,922	15,244	22,933
6	Karaoke	0	87,531	11,175	12,333	97,258	35,587	107,344	116,750	66,854
7	Permainan Ketangkasan	0	52,911	11,506	36,987	80,827	33,077	49,902	177,402	63,230
8	Reklame Papan / Bill Board / Videotron / Megatron	0	20,896	2,775	85,861	17,926	6,894	-6,120	24,246	21,783
9	Pajak Penerangan Jalan	0	5,923	15,695	10,853	33,170	28,493	38,139	21,488	21,966
10	Pos Pad Dan Tambang Gol. C Proyek	0	0	0	56,868	645,923	-29,016	30,692	61,202	109,381
11	Pajak Parkir	0	17,686	52,544	89,593	36,007	100,120	-0,665	24,494	45,682
Rata-Rata		0	35,280	82,151	34,003	55,264	33,362	34,566	51,160	46,541

Sumber : diolah dari lampiran 4 dan 5

Berdasarkan Tabel 5.7 kesebelas jenis pajak mempunyai pertumbuhan fluktuatif terhadap total pajak , kadang naik dan kadang turun. Rata-rata pertumbuhan pajak terbesar yaitu pajak Losmen / Rumah Penginapan / Pesanggraha/Hostel/Rumat Kos sebesar 134,808 % per tahun. Kemudian disusul pajak Pos Pad Dan Tambang Gol. C Proyek sebesar 109,381% per tahun. Pertumbuhan rata-rata untuk kesebelas jenis pajak pertahunnya sebesar 46,541% dan Pertumbuhan rata-rata kesebelas jenis pajak terbesar terjadi pada tahun 2009 dengan nilai 82,151% dan yang terendah pada tahun 2012 dengan nilai 33,362%.

Selanjutnya, kontribusi setiap jenis pajak daerah akan membawa pengaruh terhadap total pendapatan pajak daerah , yang akhirnya akan membawa pengaruh kepada total pendapatan asli daerah. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.8.

Berdasarkan Tabel 5.8, kesebelas jenis pajak mempunyai kontribusi fluktuatif terhadap total pajak , kadang naik dan kadang turun. Rata-rata kontribusi pajak terbesar yaitu pajak Pajak Penerangan Jalan sebesar 45,688 % per tahun. Kemudian disusul pajak Restoran sebesar 13,060 % per tahun.

Tabel 5.8 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Total Pajak Kota Kendari Tahun 2007-2014 (dalam %)

No	Jenis Pajak Daerah	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata
1	Hotel Melati Dua	6,829	6,543	5,797	7,351	6,001	6,386	6,297	6,969	6,521
2	Losmen / Rumah Penginapan / Pesanggraha/Hostel/Rumat Kos	0,062	0,107	0,707	0,710	0,525	0,519	0,525	0,511	0,458
3	Restoran	13,235	14,951	17,271	16,208	11,312	11,364	12,683	7,458	13,060
4	Rumah Makan	3,333	3,511	3,282	3,459	2,645	3,148	2,881	1,998	3,032
5	Warung	1,398	1,553	1,364	1,189	0,676	0,790	0,981	0,714	1,083
6	Karaoke	0,639	1,071	1,015	0,969	0,871	1,016	1,690	2,314	1,198
7	Permainan Ketangkasan	0,337	0,460	0,438	0,509	0,420	0,481	0,578	1,013	0,529
8	Reklame Papan / Bill Board / Videotron / Megatron	4,465	4,829	4,230	6,682	3,589	3,302	2,487	1,952	3,942
9	Pajak Penerangan Jalan	60,474	57,305	56,515	53,243	32,298	35,713	39,582	30,373	45,688
10	Pos Pad Dan Tambang Gol. C Proyek	1,439	0	0,962	1,283	4,359	2,663	2,792	2,843	2,043
11	Pajak Parkir	0,426	0,449	0,583	0,940	0,582	1,003	0,799	0,628	0,676
Rata-Rata		8,421	8,253	8,378	8,413	5,753	6,035	6,481	5,161	7,112

Sumber : diolah dari lampiran 4 dan 6

Berdasarkan uraian di atas maka kontribusi jenis pajak daerah akan mempengaruhi kontribusinya terhadap total pendapatan asli daerah. Selanjutnya untuk melihat seberapa besar kontribusi setiap jenis retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah.

Tabel 5.9 Kontribusi Pajak daerah Kota Kendari terhadap PAD tahun 2007-2014 (dalam %)

No	Jenis Pajak	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata
1	Hotel Melati Dua	2,25	2,23	2,09	2,25	3,01	3,24	2,97	3,03	2,64
2	Losmen / Rumah Penginapan / Pesanggraha/Hostel/Rumat Kos	0,02	0,04	0,25	0,22	0,26	0,26	0,25	0,22	0,19
3	Restoran	4,37	5,10	6,22	4,97	5,67	5,77	5,99	3,25	5,17
4	Rumah Makan	1,10	1,20	1,18	1,06	1,33	1,60	1,36	0,87	1,21
5	Warung	0,46	0,53	0,49	0,36	0,34	0,40	0,46	0,31	0,42
6	Karaoke	0,21	0,37	0,37	0,30	0,44	0,52	0,80	1,01	0,50
7	Permainan Ketangkasan	0,11	0,16	0,16	0,16	0,21	0,24	0,27	0,44	0,22
8	Reklame Papan / Bill Board / Videotron / Megatron	1,47	1,65	1,52	2,05	1,80	1,68	1,17	0,85	1,52
9	Pajak Penerangan Jalan	19,95	19,54	20,34	16,33	16,18	18,14	18,70	13,23	17,80
10	Pos Pad Dan Tambang Gol. C Proyek	0,47	0	0,35	0,39	2,18	1,35	1,32	1,24	0,91
11	Pajak Parkir	0,14	0,15	0,21	0,29	0,29	0,51	0,38	0,27	0,28
Rata-Rata		2,78	2,81	3,02	2,58	2,88	3,07	3,06	2,25	2,81

Sumber : diolah dari Lampiran 4 dan 7

5. KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan tentang analisis Potensi Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Kendari dapat ditentukan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pertumbuhan PAD terbesar yaitu Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 41,77% per tahun dan Pajak Daerah sebesar 37,92% per tahun. Sedangkan Kontribusi PAD terbesar yaitu Pajak daerah sebesar 40,68% per tahun dan Retribusi Daerah sebesar 36,14% per tahun.
2. Pertumbuhan Pajak daerah Terbesar dari sebelas jenis Pajak yaitu pajak Pos Pad Dan Tambang Gol. C Proyek sebesar 109,381% per tahun dan pajak Losmen / Rumah Penginapan / Pesanggraha/Hostel/Rumat Kos sebesar 134,808 % per tahun. Sedangkan, Kontribusi pajak Terbesar Terhadap PAD yaitu pajak Restoran sebesar 13,060 % per tahun dan Pajak Penerangan Jalan sebesar 45,688 % per tahun
3. Pertumbuhan Retribusi daerah Terbesar dari 18 Jenis retribusi daerah yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebesar 447,231% per tahun dan Retribusi PKD PU sebesar 107,009% per tahun. Sedangkan Kontribusi Retribusi terhadap PAD terbesar yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan RS Abunawas sebesar 24,647% per tahun dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 20,327% per tahun.
4. Pajak yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan retribusi yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah retribusi Izin mendirikan bangunan dan retribusi pelayanan kesehatan RS Abunawas.

6. REFERENSI

- Adisasmita, R, 2005. Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Adisasmita, R, 2008. Ekonomi Archipelago, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin, 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2014. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Tenggara 2009-2013.
- Badan Pusat Statistik, 2014. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kendari Tahun 2009-2013.
- Badan Pusat Statistik, 2014. Kota Kendari Dalam Angka 2014.
- Badan Pusat Statistik, 2015. Kota Kendari Dalam Angka 2015.
- Davey, K. J. 1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah-Praktek-Praktek Internasional Dan Relevansinya Bagi Dunia Ke Tiga. Penerjemah Amanullah Dkk. UI Press. Jakarta.
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, Roy Kelly. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Edisi Terjemah, UI Press, Jakarta.
- Devas, Nick. 1997. Indonesia : What Do We Mean By Decentralization? Public Administration And Development.
- Insukindro, Mardiasmo, Wahyu Widayat, Wihana Korana Jaya, B.M. Purwanto, Abdul Halim, John Suprianto, A. Budi Purnomo. 1994. Peranan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD, Buku I, KKD FE UGM, Yogyakarta.
- Kaho, J. R. 1997. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republic Indonesia.
- Mardiasmo, Makhfatih, Ahmad, Supomo, Bambang., Purwanto, Henky. 2000.

Pengembangan Model Standar Analisa Belanja (SAB) Anggaran Daerah (APBD), PAU-SE UGM, Yogyakarta.

Nastiti, Dian, Nur Anan Sejati, Noore Alam Siddiquee. 2009. Regional Autonomy And local resource mobilization in eastern Indonesia. (www.aigrp.anu.edu.au)

Rachbini, Didik J, 2001. Pembangunan Ekonomi & Sumber Daya Manusia. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Richardson, Harry W, 2001. Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional, Terjemahan PaulSitohang, Edisi Revisi, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.

Republic Indonesia, 2004. Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah 2004. Sonar Grafika, Jakarta.

_____, 2009. Undang-Undang Ri Nomor 28 tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.